

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Sistem Informasi

Pada era digital saat ini penggunaan sistem informasi telah menjadi elemen penting bagi berbagai aspek kehidupan, baik dalam dunia bisnis, pemerintahan, maupun individu. Sistem informasi membantu dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebaran informasi secara efektif dan efisien. Komponen Sistem Informasi terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, orang, dan prosedur penggunaan. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarkan informasi dalam suatu organisasi. Sistem informasi dapat membantu organisasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasionalnya, meningkatkan kualitas produk dan layanan, meningkatkan komunikasi serta kolaborasi antar pengelola dan pengguna layanan. Sistem informasi merupakan alat penting yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dan individu di era digital. Memahami konsep dasar dan manfaatnya merupakan langkah awal untuk memanfaatkannya secara optimal. (Adham, 2024)

Menurut Murphy (2020) Sistem Informasi (SI) adalah gabungan antara teknologi informasi dan aktivitas manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut untuk mendukung operasi dan manajemen. Secara lebih luas, sistem informasi merujuk pada interaksi antara manusia, proses algoritmik, data, dan teknologi dalam suatu sistem yang terintegrasi. Memahami konsep dasar dan manfaatnya merupakan Langkah awal untuk memanfaatkannya secara optimal. Analisis implementasi sistem informasi menjadi penting untuk dilakukan agar lebih memperjelas dengan mengkaji pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang kehidupan manusia.

1. Pengertian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Sistem informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi terpadu yang dipergunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang

pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan fasilitas dan mendorong terwujudnya sistem data dan informasi pembangunan, informasi keuangan serta informasi pemerintah lainnya bagi pengambilan keputusan baik di daerah maupun dipusat. Sistem ini juga diharapkan dapat meningkatkan kinerja pemerintah daerah melalui kerja sama berbasis teknologi sehingga dapat membangun database yang ada di daerah serta dapat menggambarkan potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh daerah dalam mendukung perkembangan sistem informasi pengelolaan daerah yang valid dan akurat. (Laoli et al., 2022)

Menurut (Wanda, 2023) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berfungsi sebagai sistem yang memuat data informasi dalam pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, pengawasan dan pembinaan daerah yang menggunakan konsep secara langsung dengan pemanfaatan teknologi informasi. Penggunaan sistem ini menjadi dukungan terhadap perencanaan program yang mengintegrasikan data agar efektif berdasarkan program pada instansi daerah masing-masing. Tujuan penggunaan aplikasi SIPD bagi Pemerintah Daerah, baik di Provinsi, maupun Kabupaten/Kota adalah untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berkualitas, inovatif dan cepat. Tujuan Kemendagri meluncurkan dan menerapkan SIPD ini adalah untuk mempermudah daerah dalam melaksanakan tahapan perencanaan dan penyusunan dokumen perencanaan maupun penganggaran by-system aplikasi yang sudah terintegrasi seragam di seluruh daerah.

Menurut (Musyarrafa, 2023) Teknologi informasi yang sangat mempengaruhi sistem pengolahan data dan sistem informasi pada proses perencanaan penganggaran dan program untuk melakukan pengolahan data secara efektif dan efisien maka diperlukan sistem informasi terintegrasi yang cepat dan akurat sehingga dapat secara keseluruhan dan mampu mendapatkan informasi yang transparan. Dalam mengembangkan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perlu memperhatikan aspek komunikasi yang sifatnya teknologi maupun non sistem komunikasi yang

baik menjadi penentu dalam pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD). Hal ini sangat berkaitan dengan informasi dalam setiap komunikasi sebagai tolak ukur pengembangan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD), peran infrastruktur jaringan adalah hal dasar yang membentuk jaringan komunikasi dimulai daerah sampai pusat jaringan komunikasi dapat memudahkan aliran data sehingga terkumpul dalam pusat, data dan informasi dalam pengelolaan yang menjadi informasi dalam pengambilan keputusan. Manfaat jaringan komunikasi juga dapat sebagai sarana untuk memperluas penyebaran informasi dari sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD).

2. Jenis - jenis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)

Menurut (Nasution & Nurwani, 2021) penyelenggaraan pemerintahan berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terpadu nasional sangat penting untuk diwujudkan menuju Good Governance dan menghasilkan satu data Indonesia yang akurat dan terintegrasi mulai daerah hingga pusat. Untuk itu, diterbitkanlah Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 yang mengatur jenis SIPD yang dapat dikembangkan Pemerintah Daerah menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

a. Informasi Pembangunan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data dan informasi berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah dengan melibatkan berbagai elemen terkait. SIPD juga mampu dalam memfasilitasi penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD, RENSTRA PD, dan RENJA PD sehingga analisis dan profil dari pelaksanaan pembangunan daerah mudah diperoleh, serta mampu menjadi dasar dalam pembaharuan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah. Kondisi geografis daerah, demografi, potensi sumber daya daerah, ekonomi dan keuangan daerah, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah adalah Informasi yang terdapat dalam perencanaan pembangunan daerah.

b. Informasi Keuangan Daerah

Sistem informasi pemerintahan daerah mampu mengelola data keuangan daerah melalui berbagai elemen terkait secara lebih efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan asas akuntabilitas dan transparansi. Proses pengelolaan keuangan daerah yang dimaksud meliputi:

1. Perencanaan Anggaran Daerah.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
3. Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah
4. Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Keuangan Daerah
5. Pertanggung Jawaban Barang Milik Daerah
6. Informasi Keuangan Daerah lainnya

Pengelolaan data keuangan daerah menjadi sangat penting terutama dalam mencegah terjadinya praktik penyalahgunaan kewenangan khususnya keuangan daerah. Pengkodean dan pos anggaran daerah akan dipetakan secara detail dalam proses perencanaan, dan dilaksanakan secara tepat, sehingga menghasilkan pelaporan yang lebih akurat dan cepat. Pengkodean kegiatan secara nasional juga sangat membantu dalam integrasi data keuangan daerah dengan sistem informasi pemerintah pusat terutama dalam penyampaian laporan pertanggung jawaban.

c. Informasi Pemerintah Daerah Lainnya

SIPD mampu memberikan informasi umum lainnya berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Informasi umum tersebut dapat berupa Laporan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) selama satu tahun, PERDA, dan informasi umum lainnya yang dikelola oleh berbagai elemen terkait.

2.2 Efektivitas

1. Konsep Efektivitas

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Pandu Akram, 2023)

Efektivitas umumnya dilihat sebagai tingkat pencapaian tujuan fungsional dan operasional, pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja adalah seberapa baik suatu pekerjaan dilakukan, seberapa baik seseorang menghasilkan hasil yang diharapkan. Dapat diartikan sebagai pekerjaan yang dilakukan sesuai rencana, dapat dikatakan efektif tanpa waktu, tenaga dan perubahan. Di sisi lain, efektivitas pelaksanaan kebijakan otonomi daerah adalah sejauh mana kegiatan pemerintah daerah dapat melaksanakan, melaksanakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mengambil keputusan tentang partisipasi masyarakat. Pelaksanaan pembangunan serta pemecahan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Fiska, 2021)

Menurut R. Restiana (2022) Efektivitas merupakan suatu ukuran dari produktivitas (hasil) yang mengarah terhadap tercapaian suatu pekerjaan yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, dan waktu. Efektivitas ialah tolak ukur yang merujuk pada sejauh mana pencapaian yang telah dicapai, semakin tinggi pencapaian yang dicapai maka semakin tinggi tingkatan keefektivitasnya.

Menurut Richard M. Steers dalam (Musyarrafa, 2023) Efektivitas yang berasal dari kata efektif, yaitu suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat menghasilkan satu unit keluaran (output) suatu pekerjaan dikatakan efektif jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan tepat pada waktunya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

2. Indikator Efektivitas

Menurut Muchlisin Riadi (2021) Efektivitas kerja adalah suatu ukuran dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi, tugas, program atau misi dari suatu organisasi atau perusahaan sesuai dengan target (kuantitas, kualitas dan waktu) yang telah ditetapkan. Efektivitas pekerjaan merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan. Efektivitas kerja adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu yang tepat didasarkan pada tujuan yang telah ditetapkan atau direncanakan. Pelaksanaan suatu program sesuai dengan tujuan yang direncanakan menunjukkan efektivitas program tersebut dapat terlaksana dengan baik. Sebaliknya, ketidaksesuaian pelaksanaan program dengan tujuan yang ditetapkan memperlihatkan program yang dilaksanakan belum efektif.

Berdasarkan indikator atau aspek Efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan Steers dalam Wurara et al (2024) dalam menepokong bagaimana efektivitas melalui aspek/indikator pencapaian tujuan (*goal achievement*), integrasi (*integration*), dan adaptasi (*adaptation*) sebagai berikut :

a. Pencapaian Tujuan (*Goal Achievement*)

Pencapaian tujuan menurut Steers adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari indikator, yaitu kurun waktu pencapaian ditentukan serta pencapaian sasaran target kongkret

b. Integrasi (*Integration*)

Integrasi, yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk melakukan kegiatan dari program kerja yang telah disepakati dan mengadakan sosialisasi dengan pihak lain. Integrasi terdiri dari indikator, yaitu prosedur dan proses sosialisasi.

c. Adaptasi (*Adaptation*)

Mengukur kemampuan organisasi dalam menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan eksternal maupun internal. Organisasi yang efektif harus fleksibel, responsif terhadap tantangan baru, serta mampu berinovasi dalam menghadapi dinamika yang terjadi. terdiri dari indikator mencakup peningkatan kemampuan atau sumberdaya manusianya dan sarana pra sarana

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	(Richo Gunawan Linggarjati, 2025)	Efektivitas Perencanaan Anggaran Daerah Melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia Di Kabupaten Nganjuk	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dan didasarkan pada teori efektivitas Duncan dalam Steers.	Penelitian menemukan bahwa SIPD RI cukup efektif dalam menyusun perencanaan anggaran yang lebih terstruktur, integratif, dan akuntabel. Dimensi pencapaian tujuan menunjukkan peningkatan efisiensi waktu dan ketercapaian target perencanaan. Dari sisi dimensi integrasi, SIPD RI mempermudah koordinasi antar unit kerja meskipun masih terdapat kendala teknis.

				Sedangkan pada dimensi adaptasi, pemerintah daerah menunjukkan respons positif melalui pelatihan dan pendampingan teknis. Kesimpulan: Perencanaan anggaran melalui SIPD RI di Kabupaten Nganjuk telah menunjukkan efektivitas yang cukup baik, terutama dalam aspek perencanaan yang terstruktur dan integratif. Upaya kolaboratif seperti pelatihan teknis, penguatan koordinasi, dan peningkatan infrastruktur menjadi kunci dalam mengatasi hambatan. Oleh karena itu, keberlanjutan penguatan kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung perencanaan anggaran yang optimal.
2	(Wurara et al, 2024)	Ektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Perencanaan	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam perencanaan pembangunan di Kota Tomohon, aplikasi ini dinilai inovatif dan mampu meningkatkan efisiensi

	Pembangunan Di Kota Tomohon	penyusunan perencanaan karena berbasis elektronik dan terintegrasi dengan pusat dan daerah. Namun, terdapat beberapa kendala yang perlu diperhatikan, seperti belum terpenuhinya indikatorindikator efektivitas akibat dasar hukum yang sering berubah, kurangnya sosialisasi dan pelatihan rutin bagi sumber daya manusia, serta keterbatasan sarana prasarana. Aplikasi ini meskipun sangat membantu dibandingkan metode manual, masih membutuhkan penyesuaian dan dukungan yang lebih baik agar dapat mencaiaefektivitas optimal sesuai teori Duncan dalam Steers (2012).		
3	(Maya, 2022)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dan Aplikasi Pendampingnya Sebagai Penunjang	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi pendampingnya sudah efektif dalam menunjang kinerja keuangan pada Sub Bagian Program dan Keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

		Kinerja Keuangan Di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes		Manusia Daerah Kabupaten Brebes. Keefektivitasan dari penggunaan 2 (dua) aplikasi tersebut yaitu dapat meningkatkan digitalisasi pembuatan dokumen laporan keuangan yang sebelumnya masih dilakukan dengan cara penginputan manual. Kesimpulannya, aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan aplikasi pendampingnya sudah efektif digunakan dalam menunjang kinerja keuangan di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Brebes.
4	(Setyawan, 2023)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Di Badan Pengelolaan	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Temuan dalam penelitian ini yaitu bahwa penerapan (SIPD) Dalam Meningkatkan Pelaporan Keuangan Daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar belum efektif. Faktor penghambat penerapan (SIPD) antara lain adalah sosialisasi, pelatihan dan diklat mengenai penerapan (SIPD) belum dilaksanakan dengan rutin,

		Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar Provinsi Bali		tenaga pendamping dan sumber daya manusia dari para pegawai di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar yang belum menguasai aplikasi SIPD, Pemerintah Pusat yang tidak memberikan tindak lanjut terhadap hambatan yang dilaporkan oleh BPKAD Kabupaten Gianyar dalam Penerapan (SIPD), sistem pengelolaan keuangan di aplikasi (SIPD) yang belum berjalan keseluruhan. Kesimpulan: Beberapa upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu melakukan sosialisasi berupa pelatihan dan diklat mengenai penerapan (SIPD), memberikan informasi dan pelatihan secara langsung kepada pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
5	(Indira Septiani, Neneng	Efektivitas Sistem Informasi	Pendekatan deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD telah membantu

Weti Isnawaty, 2024)	Pemerintah Daerah (SIPD) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat	digunakan dengan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi terhadap pengguna SIPD di lingkungan Sekretariat DPRD	pengelolaan data keuangan secara terstruktur dan meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, kendala seperti kesalahan input manual, keterbatasan fitur dibandingkan aplikasi sebelumnya (SIPKD), ketidakstabilan server, dan kurangnya integrasi sistem masih menghambat efektivitasnya. Tantangan semakin besar dengan implementasi SIPD RI pada tahun 2025, yang membutuhkan proses transisi manual dan kesiapan pengguna. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan menggunakan SIPD memerlukan peningkatan.
----------------------------	--	--	--